

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro maupun mikro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Tahap pengukuran kinerja merupakan tahap untuk melihat capaian kinerja dengan cara membandingkan rencana dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran tahun berjalan dan kegiatan dengan masing-masing indikator kinerjanya, terutama indikator kinerja kunci. Untuk dapat mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja, ditetapkan dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. > 100 = Sangat Baik (SB)
- b. 80 – 100 = Baik (B)
- c. 50 – 75 = Cukup (C)
- d. < 50 = Kurang (K)

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, dan membandingkan masing-masing target indikator kinerja kegiatan (hasil) dengan realisasinya, sehingga diperoleh angka capaian kinerja, melalui penggunaan rumus sebagai berikut :

Rumus I : Digunakan untuk realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja lebih baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rumus II : Digunakan untuk realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, meliputi indikator kinerja sasaran serta indikator kinerja kegiatan.

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung).

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100% dan kurang dari 80% disamping atas pencapaian kinerja 80% - 100% yang memerlukan penjelasan.

Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Output dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian, uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan *sekaliigus result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat **UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya**. Dengan demikian, kedepannya anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

Dengan anggaran berbasis kinerja, akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah**. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sementara itu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan dari tingkat Pemprov, maka dikeluarkan **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 061/Kep.1409-org/2015, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat**.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat dimulai dari pentingnya mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil.

Dengan menjelaskan, kita dapat mengetahui hasil dari kinerja kita sendiri. Apabila kita tidak dapat mengukur apakah kegiatan dan program kita berhasil atau kinerja kita bagus, maka kita tidak memahami kegiatan atau program kita sendiri. Dan apabila kita tidak paham/mengerti, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita tidak bisa memperbaikinya. Lebih lanjut, jika kita tidak dapat mendemonstrasikan hasil dan kinerja kita, maka kita tidak dapat berkomunikasi dengan para *stakeholders* kita secara baik, kita tidak dapat menjelaskan nilai yang dapat diciptakan dari uang rakyat yang dibelanjakan.

Dan kemudian menyangkut hal-hal yang lebih rinci lagi, jika kita tidak mengukur kinerja dan hasil kita, maka kita tidak bisa membedakan apakah kita berhasil atau gagal, kita tidak bisa belajar darinya, kita tidak bisa menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan dan bahkan mungkin memberi penghargaan kepada kegagalan. Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, yaitu mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali dan memboroskan sumberdaya.

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan indikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama di berbagai Instansi Pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas Instansi Pemerintah yang menetapkan Indikator Kinerja Utama. Pada akhirnya, setiap Instansi Pemerintah tersebut akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi.

Dengan demikian, tujuan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;
- 2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada;
- 3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;
- 4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di berbagai tingkatan organisasi dan pengguna informasi kinerja;
- 5) Diseminasi informasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja; dan
- 6) Rivi dan Evaluasi kinerja secara mandiri oleh instansi pemerintah sampai satuan-satuan kerja terendah.

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki tugas uraian yang dilaksanakan, yaitu ***Agar meningkatnya jumlah produksi dan tanaman pangan dan hortikultura.***

Sementara alasan terhadap uraian tersebut adalah ***untuk mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan kebijakan pembinaan implementasi penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.***

Adapun pencapaian produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2016 tersaji pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat**

Uraian IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Jumlah Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman	- Jumlah produksi padi	Ton	12.317.066
	- Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.190.793
	- Jumlah Produksi Kedelai	Ton	51.823
	- Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	81.262
	- Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	10.823
	- Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	2.261.565
	- Jumlah Produksi Ubi Jalar	Ton	463.299
	- Jumlah produksi sayuran	Ton	3.950.705
	- Jumlah produksi buah-buahan	Ton	2.884.752
	- Jumlah produksi tanaman obat	Ton	92.711
	- Jumlah produksi tanaman hias	Tangkai	280.179.881

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian, uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu, maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya

diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat **UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.** Dengan demikian, kedepannya anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

3.1.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja 2016

Adapun perbandingan target dan realisasi Indikator kinerja pada tahun 2016 tersaji pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura					99,02
	- Jumlah produksi padi	Ton	12.317.066	12.540.550 *)	101,81
	- Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.190.793	1.630.238 *)	136,90
	- Jumlah Produksi Kedelai	Ton	51.823	92.078 *)	177,68
	- Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	81.262	70.676 *)	86,97
	- Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	10.823	9.699 *)	89,61
	- Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	2.261.565	1.792.716 *)	79,27
	- Jumlah Produksi Ubi Jalar	Ton	463.299	523.201 *)	112,93
	- Jumlah produksi sayuran	Ton	3.950.705	2.702.370 *)	68,40
	- Jumlah produksi buah-buahan	Ton	2.884.752	2.166.294 *)	75,09
	- Jumlah produksi tanaman obat	Ton	92.711	100.569 *)	108,48
	- Tanaman Hias	Tangkai	280.179.881	145.905.100 *)	52,08
Adanya Efisiensi Usaha Pertanian	Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	%	10,90	10,21	106,33
Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Menurunnya luas serangan 9 OPT utama	Ha	113.889	85.362	125,05
Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jitut dan Jides Jumlah Luas sawah Baru 	Ha Ha	2.500 25.000	- **) - **)	- -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya Aparatur/Non Aparatur	Org	200	690	345,00
Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani	➤ Jumlah kelompok /pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun (pelaku/kab/kota	Orang	20	12	60,00
Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura : ➤ Padi ➤ Palawija ➤ Sayuran	% % %	32 29,40 29	13,90 48,15 80,04	161,07 43,44 163,78 276,00
Rata-Rata					128,07

Ket :

*) Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas

**) - Realisasi Jitot dan Jides tahun 2016 seluas 51.800 Ha (melalui DIPA Tugas Pembantuan Provinsi TA.2016).

- Realisasi Jumlah Luas sawah Baru (Cetak Sawah) seluas 600 Ha (melalui DIPA Tugas Pembantuan Provinsi TA.2016).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 4 tersebut diatas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 128,07%. Jika dilihat masing-masing dari 7 (tujuh) indikator kinerja diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran 1 yaitu : ***Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura***, dengan indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (*berdasarkan angka sementara Dinas*) tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu mencapai 99,02% dari target yang ditentukan. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas pertanian di Jawa Barat, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal walaupun belum mencapai target kinerjanya.
2. Untuk Sasaran 2, yaitu : ***Efisiensi Usaha Pertanian***, dengan indikator Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi telah melebihi target yang ditentukan. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi pada indikator ini mencapai 10,21% atau setara dengan 106,33% dari target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi guna mencapai target produksi Tanaman Pangan.
3. Untuk Sasaran 3, yaitu : ***Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman***, dengan indikator Menurunnya luas serangan 9 OPT utama telah melebihi target yang ditentukan. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi pada indikator ini mencapai 85.362 Ha atau setara dengan 125,05% dari target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan dan menurunkan intensitas serangan OPT pertanian di Jawa Barat.
4. Untuk Sasaran 4, yaitu : ***Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani***, dengan indikator Tersedianya Infrastruktur Pertanian tidak menghasilkan realisasi kinerja sasaran terhadap target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa telah ada upaya dari OPD untuk mendukung Sasaran Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani, dengan indikator Tersedianya Infrastruktur Pertanian secara optimal, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Adapun permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Ketidaksiapan dan ketidaksanggupan dari Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan lokasi Cetak Sawah dan SID (*Survey Investigation Design*) dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*);
 - b) Dukungan anggaran dana APBN maupun APBD TA.2016 yang tidak optimal terhadap target kinerja yang telah ditentukan terutama untuk Cetak Sawah. Alokasi dana APBN yang diberikan dalam kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*) untuk Kabupaten/Kota (DIPA

Tugas Pembantuan Provinsi) dapat terealisasi indikator kinerja cetak sawah seluas 600 Ha. Sementara kontribusi APBD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat masih bersifat dukungan administratif, pengawalan dan pembinaan teknis dalam mendukung kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*); dan

- c) Pada dana APBD dan revisi TA.2016 tidak terdapat kegiatan fisik, melainkan dalam bentuk dukungan teknis. Sedangkan dalam DIPA Tugas Pembantuan Provinsi TA.2016, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mendapatkan dukungan anggaran untuk kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi yang pelaksanaannya oleh Kabupaten/Kota dengan realisasi seluas 51.800 Ha.

- 5. Untuk Sasaran 5, yaitu : ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan***, dengan indikator Terlatihnya Aparatur PNS, realisasi pada Tahun 2016 mencapai 345,00% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan secara optimal. Adapun rincian kegiatan pelatihan pada Tahun 2016 yang dilaksanakan antara lain : Pertanian Padi Organik; Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kering; Wirausahawan Baru Dunia Pertanian; Penerapan Cara Tanam Legowo; dan Budidaya Padi.
- 6. Untuk Sasaran 6, yaitu : ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani***, dengan indikator Jumlah kelompok/pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun realisasi pada Tahun 2016 hanya mencapai 60,00% dari target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa OPD telah melakukan upaya dalam mendorong peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani secara optimal, namun dalam hal ini, ketidaktercapaian dari target kinerja disebabkan minimnya partisipasi/kesadaran dari para kelompok/pelaku akan penerapan sistem jaminan mutu ini.
- 7. Untuk Sasaran 7, yaitu : ***Meningkatnya Margin Usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura***, dengan indikator Persentase Margin Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 161,07%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan Margin Usahatani Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal sehingga mampu melampaui target kinerjanya.

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 dengan Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja pada tahun 2015, diperoleh rincian capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Realisasi 2016 Thdp Tahun 2015 (3/4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi padi - Jumlah Produksi Jagung - Jumlah Produksi Kedelai - Jumlah Produksi Kacang Tanah 	12.540.550 *) 1.630.238 *) 92.078 *) 70.676 *)	11.373.234 *) 959.933 *) 98.938 *) 80.719 *)	98,98 110,26 169,83 93,07 87,56
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produksi Kacang Hijau - Jumlah Produksi Ubi Kayu - Jumlah Produksi Ubi Jalar - Jumlah produksi sayuran - Jumlah produksi buah-buahan - Jumlah produksi tanaman obat - Tanaman Hias 	9.699 *) 1.792.716 *) 523.201 *) 2.702.370 *) 2.166.294 *) 100.569 *) 145.905.100 *)	9.691 *) 2.000.224 *) 456.176 *) 2.413.015 **) 3.825.699 **) 113.778 **) 218.913.296 **)	100,08 89,63 114,69 111,99 56,62 88,39 66,65
Adanya Efisiensi Usaha Pertanian	Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	10,21	10,69	104,49
Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Menurunnya luas serangan 9 OPT utama	85.362	85.541	100,21
Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jitut dan Jides • Jumlah Luas sawah Baru 	- -	- -	- -
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya Aparatur PNS	690	173	398,84
Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kelompok /pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun (pelaku/kab/kota 	12	18	66,67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Realisasi 2016 Thdp Tahun 2015 (3/4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura : ➢ Padi ➢ Palawija ➢ Sayuran	13,90 48,15 80,04	33,00 32,23 36,70	136,53 42,12 149,39 218,09
Rata-rata				129,39

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 5 tersebut diatas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 129,39%. Jika dilihat masing-masing indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran 1 yaitu : **Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura**, dengan indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Apabila dibandingkan realisasi pada tahun 2016 dengan realisasi pada tahun 2015, maka pencapaian realisasi pada tahun 2016 lebih kecil 1,02% (98,98%) dari tahun 2015. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas pertanian di Jawa Barat sudah sangat optimal, namun secara kualitatif dan kuantitatif apabila dibandingkan realisasi tahun 2016 dengan tahun 2015, kondisi tahun 2016 lebih kecil dari tahun 2015. Kondisi tersebut diakibatkan adanya pengaruh iklim/cuaca yang terjadi pada tahun 2016.
2. Untuk Sasaran 2, yaitu : **Efisiensi Usaha Pertanian**, dengan indikator Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi realisasi pada tahun 2016 telah melebihi dari realisasi pada tahun 2015. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mencapai 104,49% (tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015). Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.
3. Untuk Sasaran 3, yaitu : **Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman**, dengan indikator Menurunnya luas serangan 9 OPT utama, realisasi pada tahun 2016 telah melebihi dari realisasi pada tahun 2015. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi pada indikator ini di tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 mencapai 100,21% (lebih baik dari tahun 2015). Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan dan menurunkan intensitas serangan OPT pertanian di Jawa Barat di tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015.

4. Untuk Sasaran 4, yaitu : ***Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani***, dengan indikator Tersedianya infrastruktur pertanian pada Tahun 2016, realisasi yang dihasilkan masih sama seperti tahun 2015 (realisasi = 0%). Sebenarnya dalam proses mendukung indikator kinerja ini, upaya Dinas telah ada (diusulkan), namun dalam perjalanannya dukungan ketersediaan anggaran dana APBN maupun APBD TA.2016 tidak optimal (tidak ada dukungan anggaran). Melihat kondisi tersebut menunjukkan sebenarnya upaya yang dilakukan OPD (*Dinas Pertanian Tanaman Pangan*) telah ada dalam mendukung ketersediaan infrastruktur pertanian di tahun 2016 agar lebih baik dibandingkan tahun 2015, namun pada pelaksanaannya indikator kinerja sasaran ini tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya dukungan anggaran. Namun melalui alokasi dana APBN TA.2016 Tugas Pembantuan Provinsi, indikator kinerja sasaran tersebut teralokasikan anggarannya.
5. Untuk Sasaran 5, yaitu : ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan***, dengan indikator Terlatihnya Aparatur PNS, realisasi pada Tahun 2016 mencapai 690 orang sedangkan realisasi pada tahun 2015 mencapai 173 orang atau setara 398,84% dibanding realisasi tahun 2015. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2016 lebih optimal dibandingkan pada tahun 2015. Hal ini terjadi diakibatkan karena, responsifnya peserta yang hadir akan acara pelatihan ini.
6. Untuk Sasaran 6, yaitu : ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani***, dengan indikator Jumlah kelompok/pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun, realisasi pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mencapai 66,67% (lebih kecil dari realisasi tahun 2015). Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani di tahun 2016 tidak seoptimal pada tahun 2015.
7. Untuk Sasaran 7, yaitu : ***Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura***, dengan indikator Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura realisasi pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 mencapai 136,53% (kondisi lebih baik dari tahun 2015). Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2016 secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal lebih baik dari tahun 2015.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016 terhadap target total Renstra OPD 2013-2018

Dalam Dokumen Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2013-2018 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut

maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2013-2015) terhadap total target Renstra di tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 terhadap target total Renstra OPD 2013-2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi sampai dengan Tahun 2016 (Tahun 2014+2015+2016)	Target Renstra s/d Tahun 2018 (2013-2018)	Realisasi 2015 Thdp Tahun 2014 (3/4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura				61,57
	- Jumlah produksi padi	35.558.683	61.639.151	57,69
	- Jumlah Produksi Jagung	3.637.248	5.968.150	60,94
	- Jumlah Produksi Kedelai	306.277	259.340	118,10
	- Jumlah Produksi Kacang Tanah	225.203	406.470	55,40
	- Jumlah Produksi Kacang Hijau	32.139	54.138	59,36
	- Jumlah Produksi Ubi Kayu	6.042.964	11.312.258	53,42
	- Jumlah Produksi Ubi Jalar	1.451.114	2.317.404	62,62
	- Jumlah produksi sayuran	7.845.105	19.761.275	39,70
	- Jumlah produksi buah-buahan	8.424.063	14.285.649	58,97
	- Jumlah produksi tanaman obat	314.643	463.739	67,85
	- Tanaman Hias	606.022.346	1.401.448.822	43,24
Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Menurunnya luas serangan 9 OPT utama	85.362	111.622	123,53
Adanya Efisiensi Usaha Pertanian	Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	10,21	10,50	102,76
Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jitut dan Jides Jumlah Luas sawah Baru 	10.120 700	12.000 100.000	84,33 0,70
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya Aparatur PNS	1.140	1.000	114,00
Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi sampai dengan Tahun 2016 (Tahun 2014+2015+2016)	Target Renstra s/d Tahun 2018 (2013-2018)	Realisasi 2015 Thdp Tahun 2014 (3/4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok tani				
	➢ Jumlah kelompok /pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun (pelaku/kab/kota)	50	100	50,00
Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura : ➢ Padi ➢ Palawija ➢ Sayuran	14,30 25,55 36,92	40,00 35,00 35,00	71,41 35,75 73,00 105,49
Rata-rata				80,83

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 6 tersebut diatas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 80,83%. Jika dilihat masing-masing indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran 1 yaitu : **Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura**, dengan indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 61,57%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas pertanian di Jawa Barat, secara kualitatif dan kuantitatif sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.
2. Untuk Sasaran 2, yaitu : **Efisiensi Usaha Pertanian**, dengan indikator Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi telah melebihi target yang ditentukan. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 mencapai 102,76%. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi, sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.
3. Untuk Sasaran 3, yaitu : **Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman**, dengan indikator Menurunnya luas serangan 9 OPT utama telah melebihi target yang ditentukan. Dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) pada indikator ini realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 mencapai 123,53. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan dan menurunkan intensitas

serangan OPT pertanian di Jawa Barat, sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.

4. Untuk Sasaran 4, yaitu : ***Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani***, dengan indikator Tersedianya infrastruktur pertanian realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 42,52%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas pertanian di Jawa Barat, secara kualitatif dan kuantitatif, sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.
5. Untuk Sasaran 5, yaitu : ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan***, dengan indikator Terlatihnya Aparatur PNS, realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 mencapai 114,00%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan dan Pelatihan, sampai dengan tahun 2016 telah sangat-sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.
6. Untuk Sasaran 6, yaitu : ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani***, dengan indikator Jumlah kelompok /pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 mencapai 50,00%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani, sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.
7. Untuk Sasaran 7, yaitu : ***Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura***, dengan indikator Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura realisasi sampai dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2018 mencapai 71,41%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura, sampai dengan tahun 2016 sangat relevan apabila dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan Tahun 2018.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Nasional Tahun 2016

Kualitas pencapaian target kinerja pembangunan pertanian Jawa Barat tentu saja perlu diperbandingkan dengan capaian kinerja di tingkat Nasional. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar peran dan prestasi sub sektor pertanian Jawa Barat di tingkat Nasional. Adapun berdasarkan hasil pengukuran perbandingan kinerja

Tahun 2016 terhadap kinerja Nasional, adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Nasional 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Capaian Kinerja dan Standar Nasional Tahun 2016	Kontribusi Jawa Barat Terhadap Nasional (%)	Peringkat Jawa Barat dalam hal Produksi dengan Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Jumlah produksi padi	12.540.550	79.347.116	15,80	2
	- Jumlah Produksi Jagung	1.630.238	23.592.367	6,91	5
	- Jumlah Produksi Kedelai	92.078	858.305	10,73	4
	- Jumlah Produksi Kacang Tanah	70.676	573.055	12,33	3
	- Jumlah Produksi Kacang Hijau	9.699	252.583	3,84	5
	- Jumlah Produksi Ubi Kayu	1.792.716	20.254.289	8,85	4
	- Jumlah Produksi Ubi Jalar	523.201	2.099.226	24,92	1
Rata-rata				11,91	

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 terhadap capaian Nasional sebagaimana yang disajikan dalam tabel 7 diatas secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 11,91% terhadap Capaian Kinerja Nasional, bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang kami ukur adalah capaian kinerja pada Sasaran **Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura** dengan Indikator Jumlah produksi tanaman pangan (hanya komoditas utama tanaman pangan : Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar), dengan perincian sebagai berikut :

1. **Jumlah produksi padi**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 12.540.550 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 79.347.116 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi padi Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 15,80%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut menduduki peringkat nomor 2 secara Nasional.
2. **Jumlah produksi jagung**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 1.630.238 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 23.592.367 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi jagung Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 6,91%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut menduduki peringkat nomor 5 secara Nasional.

3. **Jumlah produksi kedelai**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 92.078 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 858.305 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi kedelai Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 10,73%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut menduduki peringkat nomor 4 secara Nasional.
4. **Jumlah produksi kacang tanah**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 70.676 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 573.055 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi kacang tanah Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 12,33%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut menduduki peringkat nomor 3 secara Nasional.
5. **Jumlah produksi kacang hijau**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 9.699 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 252.583 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi kacang tanah Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 3,84%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut menduduki peringkat nomor 5 secara Nasional.
6. **Jumlah produksi ubi kayu**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 1.792.716 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 20.254.289 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi kacang tanah Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 8,85%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat nomor 4 secara Nasional.
7. **Jumlah produksi ubi jalar**, dengan realisasi produksi pada Tahun 2016 sebesar 523.201 Ton dibandingkan dengan produksi Nasional sebesar 2.099.226 Ton. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi produksi kacang tanah Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 24,92%. Adapun peringkat dari kontribusi tersebut Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat nomor 1 secara Nasional.

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan dari Pengukuran per Indikator Kinerja Sasaran 2016

3.1.3.1 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk mencapai sasaran peningkatan ketersediaan pangan masyarakat Jawa Barat didukung dengan beberapa indikator kinerja yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu serta ubi jalar, sayuran, buah-buahan dan tanaman obat. Pengukuran kinerja dari indikator-indikator kinerja telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah disajikan pada tabel 4 diatas.

Program-program pembangunan yang mendukung sasaran meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat Jawa Barat yang didanai dari **APBD** Provinsi Jawa Barat antara lain : Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, serta Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan. Sedangkan program pembangunan yang didanai dari **APBN** antara lain : Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Program

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Sementara pada kegiatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Jawa Barat Meningkat ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-1 (satu) yaitu : Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan.

Tabel 8. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Ketersediaan pangan masyarakat Jawa Barat meningkat					99,02
	- Jumlah produksi padi	Ton	12.317.066	12.540.550 *)	101,81
	- Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.190.793	1.630.238 *)	136,90
	- Jumlah Produksi Kedelai	Ton	51.823	92.078 *)	177,68
	- Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	81.262	70.676 *)	86,97
	- Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	10.823	9.699 *)	89,61
	- Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	2.261.565	1.792.716 *)	79,27
	- Jumlah Produksi Ubi Jalar	Ton	463.299	523.201 *)	112,93
	- Jumlah produksi sayuran	Ton	3.950.705	2.702.370 *)	68,40
	- Jumlah produksi buah-buahan	Ton	2.884.752	2.166.294 *)	75,09
	- Jumlah produksi tanaman obat	Ton	92.711	100.569 *)	108,48
	- Tanaman Hias	Tangkai	280.179.881	145.905.100 *)	52,08

Ket :

*) Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas tahun 2016, untuk produksi pangan tahun 2016 pada pengukuran kinerja dari sasaran strategis apabila dibandingkan dengan target, pengukuran kinerja belum mencapai dari target yang ditentukan yaitu sebesar 99,02%. Realisasi terbesar disumbang oleh komoditas Kedelai yaitu sebesar 177,68% (92.078 ton) dan komoditas jagung yang mencapai 136,90% (1.630.238 ton).

Sedangkan untuk komoditas padi, apabila dibandingkan dengan target sasaran strategis juga telah mencapai dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 12.540.550 ton GKG (101,81%), namun belum masuk kedalam kategori penyumbang realisasi tertinggi. Dan apabila dibandingkan dengan Angka Sementara Tahun 2015, produksi padi mengalami kenaikan produksi sebesar 1.167.316 ton GKG atau naik setara 10,26%.

Pada tahun 2016 ini, produksi jagung berdasarkan Angka Sementara Dinas menunjukan jumlah realisasi yang cukup memuaskan atau melebihi target yang telah

ditentukan. Tercapainya target produksi berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas tahun 2016 yaitu sebesar 1.630.238 ton atau sama dengan 136,90%. Hal ini disebabkan karena : 1) Adanya pertanaman dilahan kering/perkebunan dalam ha ini PT. Perhutani yang memperbolehkan melaksanakan bukaan baru untuk pertanaman jagung dilahan kering ini (bukaan tahun 2015 dimanfaatkan tahun 2016); 2) Alih komoditas yang cukup tinggi dari komoditas Kedelai; 3) Adanya Program bantuan dari Pusat untuk mendukung produksi jagung; dan 4) Terdapat sisa program tahun 2015 seluas 60.000 Ha dan di tahun 2016 seluas 109.000 Ha untuk pertanaman jagung. Demikian pula apabila dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2015, produksi jagung di tahun 2016 mengalami kenaikan produksi sebesar 670.305 ton atau naik sebesar 69.83%.

Pada tahun 2016 ini, produksi kedelai dapat melebihi target yang telah ditentukan secara signifikan (>100%). Dari target 51.823 ton realisasi produksi berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas tahun 2016 mencapai 92.078 ton (177,68%). Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2015 produksi kedelai ini mengalami penurunan sebesar 6.860 ton atau turun setara dengan 6,93%. Penurunan realisasi produksi Kedelai dari tahun 2016 terhadap tahun 2015 ini disebabkan antara lain karena : 1) Kompetisi lahan dengan komoditi lainnya khususnya jagung; 2) Masih lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan/pembiayaan usaha; 3) Belum jelasnya jaminan pasar; dan 4) Ketersediaan benih belum sesuai dengan prinsip 6 Tepat.

Sementara itu, untuk komoditi Kacang Tanah, produksi yang dihasilkan berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas tahun 2016 produksi kacang tanah tidak mencapai target yang telah ditentukan sejalan dengan realisasi produksi berdasarkan Angka Sementara Dinas pada komoditas Kacang Hijau dan Ubi Kayu pada tahun 2016 yang juga tidak mencapai dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk komoditi Ubi Jalar menunjukkan jumlah realisasi yang cukup memuaskan atau melebihi target yang telah ditentukan. Tercapainya target produksi berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Dinas tahun 2016 yaitu sebesar 523.201 ton atau sama dengan 112,93%. Demikian pula apabila dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2015, produksi Ubi Jalar di tahun 2016 mengalami kenaikan produksi sebesar 67.025 ton atau naik sebesar 14,69%.

Atas penjelasan diatas, bahwa ketidaktercapaian dari target produksi yang telah ditentukan dikarenakan pertanaman palawija khususnya Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Kayu sebagian besar ditanam di lahan sawah serta akibat dari kemarau basah. Selain itu, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Kayu yang telah dapat dipanen terbentur dengan terbatasnya peralatan pasca panen yang ada di petani, seperti *power thraser*, *dryer*, terpal plastik, dll. Kondisi ini mengakibatkan kehilangan hasil produksi Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Kayu masih tinggi. Disamping itu, dukungan program untuk peningkatan produksi komoditas palawija tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagai akibat dari faktor iklim dan keterlambatan aturan penggunaan subsidi benih.

Sementara untuk bidang hortikultura, berdasarkan angka Sementara Dinas 2016, hanya produksi komoditas tanaman obat-obatan saja yang melebihi target. Sedangkan untuk produksi sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman hias tidak mencapai target yang telah ditentukan. Namun, apabila dibandingkan dengan relisasi produksi tahun 2015, hanya produksi untuk tanaman buah-buahan saja yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi tahun 2016. Hal ini antara lain dikarenakan agroklimat yang kurang mendukung (kemarau panjang) terhadap pertumbuhan tanaman hortikultura.

Untuk komoditi hortikultura mencapai hasil yang kurang menggembirakan pada komoditi tanaman sayuran (terjadi ketidakcapaian target yang sangat signifikan). Hal ini disebabkan karena luas tanam untuk komoditas sayuran semakin sedikit, dikarenakan petani lebih memfokuskan pada luas tanam untuk komoditas padi, jagung dan kedelai, selain itu, kondisi iklim (DPI) yang ekstrim menyebabkan produksi ketiga komoditi ini menjadi kurang optimal.

3.1.3.2 Menurunnya Tingkat Kehilangan Hasil

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis : Adanya Efisiensi Usaha Pertanian diindikasikan oleh Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi. Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut diatas disajikan pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Menurunnya Tingkat Kehilangan Hasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Adanya Efisiensi Usaha Pertanian	- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	%	10,90	10,21	106,33

Pada tahun 2016, tingkat kehilangan hasil pasca panen padi mengalami penurunan sebesar 0,69% bila dibandingkan dengan target sasaran strategis, dengan menggunakan rumus perhitungan ke II (realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik) realisasi pada indikator ini mencapai 106,33% dari target yang telah ditentukan. Adapun permasalahan tingkat kehilangan hasil yang selama ini terjadi, antara lain : 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana pascapanen di lapangan; 2) Alat sarana pascapanen belum merata dan masih kurang; 3) Proses adopsi teknologi pascapanen berjalan lambat; 4) Intensitas Pembangunan Sektor Non Pertanian sangat tinggi; 5) Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit; 6) Kondisi alam yang berbeda antara Wilayah Jabar Utara dan Jabar Selatan; 7) Jawa Barat merupakan wilayah rawan bencana alam; 8) Anomali Iklim; dan 9) Dukungan *Stake Holder* belum maksimal.

Jika dibandingkan dengan susut hasil pada tahun 2015, susut hasil padi pada tahun 2016 secara umum mengalami penurunan sebesar 0,48%. Adapun rincian dari

komponen susut hasil ini yaitu pada komponen panen, rata-rata susut hasil sebesar 1,87% pada tahun 2016. Hal ini tergolong kurang baik karena sebagian besar petani menerapkan sistem keroyokan pada saat panen. Akibatnya banyak padi yang terinjak sehingga bulir padinya rontok. Begitu juga sabit yang digunakan petani untuk panen masih sabit biasa bukan bergerigi, sehingga waktu yang digunakan untuk memotong padi relatif lebih lama dibanding sabit bergerigi, akibat besarnya tekanan pada rumpun padi banyak butir padi yang rontok.

Sementara pada komponen pengeringan rata-rata susut hasil sebesar 8,34% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan semakin banyaknya petani menggunakan alas terpal plastik dibandingkan dengan alas tradisional seperti geribig sehingga gabah yang tercecer pada saat pengeringan relatif kecil. Kemudian, hal itu juga disebabkan semakin banyaknya petani terutama pada musim hujan yang menggunakan mesin pengering seperti *flat dryer* dan *vertical dryer* untuk mengeringkan gabahnya.

Agar tingkat susut hasil terus dapat ditekan dan diturunkan upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain adalah :

- a. Peningkatan pengembangan dan bantuan Alsintan panen dan pasca panen padi baik dari APBN maupun APBD yang diarahkan pada Alsintan tepat guna, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil, peningkatan mutu hasil, dan nilai tambah. Bantuan alsintan tersebut harus pada semua tahapan yaitu panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan.
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan usaha pasca panen dan industri pengolahan hasil, melalui Bimbingan Teknis Penanganan Panen dan Pasca Panen Padi dan Beras Yang Baik atau *Good Handling Practices* (GHP).
- c. Penyediaan Skim Kredit khusus untuk Alsintan pasca panen yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan.

Untuk penilaian kinerja atas indikator Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi menggunakan rumus : **untuk realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik**. Artinya dengan realisasi yang lebih kecil (secara signifikan) dari target sasaran pada tahun 2016 untuk indikator Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi dapat dikatakan berhasil bahkan **Sangat Baik**.

Untuk kegiatan Adanya Efisiensi Usaha Pertanian ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-3 (tiga) yaitu : Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

3.1.3.3 Menurunnya Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis : Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman diindikasikan oleh beberapa Indikator Kinerja seperti yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut diatas disajikan pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	- Jumlah luas serangan 9 OPT utama	Ha	113.889	85.362	125,05

Upaya pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perlu dilakukan untuk menjaga produk hasil pertanian terjaga kualitas dan kuantitasnya.

Pada tahun 2016 ini, upaya pengendalian OPT dapat dikatakan berhasil. Adapun upaya yang dilakukan antara lain melalui berbagai kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah Kebijakan "*Early Warning System (EWS)*", yaitu pengembangan sistem peringatan dini dengan harapan keberadaan dan peningkatan serangan OPT dapat diantisipasi sebelum terjadi kerugian yang sangat tinggi. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang optimal terbukti dengan signifikannya penurunan luas serangan OPT di Jawa Barat. Selain itu, faktor perbaikan pola tanam dan cara pengendalian OPT ditingkat petani yang diarahkan menuju Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dimana cara pengendalian lebih diarahkan pada pendekatan-pendekatan yang mengandalkan peran agro-ekosistem yang salah satunya adalah pemanfaatan musuh alami (MA) dan penggunaan agens hayati (AH), ikut mempengaruhi upaya pengendalian OPT ramah lingkungan. Dari target sebesar 113.889 Ha, telah berhasil diamankan lebih dari 28.527 Ha dari target, sehingga luas serangan OPT hanya terjadi sebesar 85.362 Ha atau 125,05%.

Dalam hal ini, tentunya merupakan keberhasilan atas kinerja para Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di lapangan dan koordinasi antar lembaga terkait. Karena penilaian kinerja atas indikator Jumlah luas serangan 9 OPT utama menggunakan rumus : **untuk realisasi yang lebih besar menunjukkan kinerja kurang baik**. Artinya dengan realisasi yang lebih kecil (secara signifikan) dari target sasaran pada tahun 2016 untuk indikator Jumlah luas serangan 9 OPT utama dapat dikatakan berhasil bahkan **Sangat Baik**.

Adapun Kegiatan Mengendalikan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman, ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-1 (satu) yaitu : Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan.

3.1.3.4 Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis : Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani diindikasikan oleh tersedianya kebutuhan benih padi, kentang, palawija, tanaman buah, pupuk dan infrastruktur irigasi.

Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut diatas disajikan pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Guna Mendukung Usaha Tani

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani					--
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Luas Sawah yang dapat diairi jaringan irigasi (Jitut dan Jides) 	Ha	2.500	---	--
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Luas Sawah Baru 	Ha	25.000	--	--

Air merupakan salah satu faktor penentu (determinan) dalam proses produksi pertanian, oleh karena itu investasi irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka penyediaan air untuk pertanian dalam memenuhi kebutuhan berbagai keperluan usaha tani, maka air (irigasi) harus diberikan dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat, jika tidak maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian.

Pemberian air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai, sarana dan prasarana tersebut dapat berupa : bendungan, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Terganggunya atau rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian yang diharapkan dan berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.

Pada tahun 2016 pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis : Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha tani, yang mencakup indikator kinerja Jumlah Luas Sawah yang dapat diairi jaringan irigasi (Jitut dan Jides) dapat dikatakan mengalami kegagalan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap penilaian indikator sasaran stratejik Dinas. Akan tetapi, kegagalan dari indikator Jumlah Luas Sawah yang dapat diairi jaringan irigasi (Jitut dan Jides) memiliki dasar yang kuat.

Adapun ketidakcapaian indikator ini disebabkan kerena Pada dana APBD dan revisi TA.2016 tidak terdapat kegiatan fisik, melainkan dalam bentuk dukungan teknis. Sedangkan dalam DIPA Tugas Pembantuan Provinsi TA.2016, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mendapatkan dukungan anggaran untuk kegiatan perbaikan

Jaringan Irigasi yang pelaksanaannya oleh Kabupaten/Kota dengan realisasi seluas 51.800 Ha.

Sementara itu, sejalan dengan indikator kinerja Jumlah Luas Sawah yang dapat diairi jaringan irigasi (Jitot dan Jides), indikator kinerja Jumlah Luas Sawah Baru pun dapat dikatakan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena : 1) Ketidaksiapan dan ketidakanggupan dari Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan lokasi Cetak Sawah dan SID (*Survey Investigation Design*) dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*); dan 2)) Dukungan anggaran dana APBN maupun APBD TA.2016 yang tidak optimal terhadap target kinerja yang telah ditentukan terutama untuk Cetak Sawah. Alokasi dana APBN yang diberikan dalam kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*) untuk Kabupaten/Kota (DIPA Tugas Pembantuan Provinsi) dapat terealisasi indikator kinerja cetak sawah seluas 600 Ha. Sementara kontribusi APBD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat masih bersifat dukungan administratif, pengawalan dan pembinaan teknis dalam mendukung kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (*Cetak Sawah*).

Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sehingga mulai pada tahun 2014 kegiatan Luas Sawah Baru dijadikan salah satu indikator kinerja sasaran strategik Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan telah menjadi bagian dari RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Kegiatan Luas Sawah Baru dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada. Melihat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian, maka pemerintah melalui **Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010**, telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan sawah sejalan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperluas baku lahan pertanian melalui perluasan sawah yang didukung dengan penganggaran APBN Tahun 2016.

Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka masih sangat dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah. Kegiatan perluasan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi, Survei Investigasi dan Desain (SID), penetapan lokasi sampai dengan pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Untuk itu diperlukan Kerangka Acuan Survei Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan pemanfaatannya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu, kegiatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Guna Mendukung Usaha Taniada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-3 (tiga) yaitu : Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian.

3.1.3.5 Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia Pertanian

Pencapaian kinerja sasaran strategis : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan diindikasikan oleh terlatihnya aparatur petugas PNS dan terlatihnya non aparatur.

Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut di atas disajikan pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan	Terlatihnya Non Aparatur PNS	Org	200	690	345,00

Meskipun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pendidikan dan Pelatihan sudah dialihkan di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, namun terdapat Balai Pelatihan Pertanian Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan tupoksi pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur PNS atau penyuluh dalam rangka kegiatan Pelatihan Pertanian Padi Organik bagi Aparatur. Adapun rincian kegiatan pelatihan pada Tahun 2016 yang dilaksanakan antara lain : Pertanian Padi Organik; Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kering; Wirausahawan Baru Dunia Pertanian; Penerapan Cara Tanam Legowo; dan Budidaya Padi. Adapun realisasi pada Tahun 2016 mencapai 345% jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk Kegiatan Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan dan Pelatihan, ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-2 (dua) yaitu : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pertanian.

3.1.3.6 Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pada Kelompok Tani

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis : Peningkatan Arus Pemasaran Produk Pertanian diindikasikan oleh Meningkatnya dan berkembangnya Jumlah kelompok /pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu per tahun.

Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut di atas disajikan pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok Tani

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Peningkatan Arus Pemasaran Produk Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani:	Pelaku	20	12	60,00

Adapun persentase hasil realisasi pada Tahun 2016 untuk indikator Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan pada Kelompok tani dapat dikatakan cukup memuaskan, meskipun tidak dapat mencapai target yang ditentukan, dengan realisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani hanya mencapai 60,00%. Hal tersebut disebabkan karena minimnya partisipasi/kesadaran dari para kelompok/pelaku akan penerapan sistem jaminan mutu ini.

Kegiatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Kelompok tani ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-4 (empat) yaitu : mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan.

3.1.3.7 Meningkatnya Margin Usahatani Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis : Peningkatan Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura diindikasikan oleh Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan Peningkatan Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura terdapat pada sasaran strategis yang dituangkan dalam RENSTRA pada misi ke-5 (lima) yaitu : Meningkatkan akses pasar dan permodalan.

Hasil pencapaian kinerja dari indikator kinerja tersebut di atas disajikan pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Pengukuran Kinerja dari Sasaran Strategis : Peningkatan Margin Usahatani tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	%
Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura : ➢ Padi ➢ Palawija ➢ Sayuran	 (%) (%) (%)	 32 29,40 29	 13,90 48,15 80,04	161,07 43,44 163,78 276,00

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam setiap tahapan pembangunan, kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama.

Sebagai negara agraris, jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan pertanian/agribisnis sangat besar, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Margin Usahatani Komoditas Pangan dan Hortikultura.

Terlihat pada tabel diatas, bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja peningkatan margin usahatani untuk tanaman pangan dan hortikultura dapat tercapai (bahkan lebih) dari target yang telah ditetapkan. Namun untuk komoditas padi, terjadi ketidakcapaian dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, secara pendapatan, petani masih tetap mendapatkan keuntungan, namun apabila dibandingkan dengan keuntungan usahatani padi pada tahun 2015, keuntungan pada tahun 2016 relatif berkurang. Turunnya margin usahatani ini disebabkan oleh naiknya harga-harga sarana produksi, upah harian orang kerja (HOK) dan gangguan alam. Sementara kenaikan harga gabah dipasaran maupun HPP di Bulog relatif naik sedikit.

Untuk komoditi Palawija, khususnya jagung dan kedelai dari target sebesar 29,4% realisasi ditahun 2016 ini margin usahatannya mencapai 48,15% melampaui target sebesar 18,75%. Hal ini disebabkan oleh produktivitas yang tinggi disertai volume permintaan pasar yang besar, sehingga harga jagung dan kedelai menjadi tinggi. Keadaan ini akhirnya meningkatkan pendapatan petani yang berpengaruh terhadap meningkatnya margin usahatani petani komoditas Palawija.

Kemudian pada komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan bawang merah, dari target 29,00% realisasi margin usahatani pada tahun 2016 mencapai 80,04% melampaui target sebesar 51,04%. Hal ini disebabkan oleh tingginya produktivitas dan volume permintaan pasar yang besar, sehingga harga menjadi naik. Selanjutnya, keadaan ini dapat meningkatkan penerimaan sekaligus pendapatan petani yang pada akhirnya meningkatkan margin usahatannya.

Adapun persentase hasil realisasi keseluruhan pada indikator margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura di tahun 2016 untuk sasaran Meningkatnya Margin usahatani Komoditas tanaman pangan dan hortikultura mencapai 161,07%.

Margin Usahatani Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura ada pada sasaran strategis yang dituangkan didalam RENSTRA pada misi ke-5 (lima) yaitu : Meningkatkan Akses Pasar dan Permodalan.

3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2014, terdapat 7 (tujuh) sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016. Ketujuh sasaran stretegis tersebut diukur melalui pencapaian indikator-indikator kinerja yang merupakan hasil kegiatan program yang dilaksanakan dari tahun 2014.

Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 tersaji pada tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Hasil Identifikasi Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat TA. 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	99,02	B
2.	Menurunnya Tingkat Kehilangan Hasil	106,33	SB
3.	Menurunnya Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	125,05	SB
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian	-	K
5.	Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia Pertanian	345,00	SB
6.	Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pada Kelompok Tani	60,00	C
7.	Meningkatnya Margin Usahatani Komoditas Pangan dan Hortikultura	161,07	SB

Dari data pada Tabel Hasil Analisis tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, untuk tahun 2016 dilaksanakan 7 (tujuh) sasaran strategis, sebanyak 4 (empat) capaian kinerja menunjukkan Kriteria **Sangat Baik** atau diatas 100%, 1 (satu) capaian kinerja menunjukkan Kriteria **Baik** atau 80 – 100%, 1 (satu) capaian kinerja menunjukkan Kriteria **Cukup** atau 50 – 75% dan 1 (satu) capaian kinerja menunjukkan Kriteria **Kurang** atau dibawah 50%.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas.

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor pertanian Jawa Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara :

- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan pertanian Jawa Barat;
- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan pohon induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman pertanian, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pertanian, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta pendukung prasarana pertanian, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha pertanian;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur pertanian, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman pertanian, serta pengolahan produk pertanian.

Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci.

Secara umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan 4 (empat) sasaran tercapai melebihi target, 1 (satu) sasaran hampir mencapai target dan 2 (dua) tidak dapat mencapai target.

3.1.5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu satuan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama kinerja Pertanian dalam meningkatkan jumlah produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahunnya. Peningkatan pembangunan Pertanian akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Secara Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggarandengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

Penggunaan Sumber Dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber dana. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dalam meningkatkan penggunaan agar seimbang dengan pemenuhan sumber dana yang telah diberikan. Selain dengan peningkatan mutu hasil Pertanian yang seiring dengan peningkatan jumlah komoditas Pertanian dan tingginya permintaan akan pelayanan yang optimal, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menyediakan unit kerja yang dapat berperan aktif dalam peningkatan Pelayanan Pertanian di Jawa Barat.

3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan TA.2016 yang Menunjang Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016, program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang menunjang dan mendukung terhadap capaian kinerja yang bersumber dari dana APBD, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1. Kegiatan APBD

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja Tahun 2016, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan program/kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja, antara lain terdiri dari :

1. Dalam pencapaian Indikator ke-1 yaitu Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
 - a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Serealisa;
 - b. Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul Lainnya (TKW-13);
 - c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat;
 - d. Penyediaan Benih Bersertifikat di Jawa Barat Pada Balai Pengembangan Benih Padi;
 - e. Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija;
 - f. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat;
 - g. Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat;
 - h. Pengembangan Agribisnis Buah-buahan;
 - i. DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri

Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di Bidang Hortikultura (DBHCHT);

- j. Pengembangan Perbenihan Kentang di BPB Kentang;
 - k. Pengembangan Mekanisasi Pertanian di BP Mekanisasi Pertanian;
 - l. Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di BPB Hortikultura;
 - m. GCB Model Pengembangan Usahatani Hortikultura Terpadu Berbasis Konservasi di DAS Citarum (GCB).
 - n. Pengembangan Pertanian Terpadu di Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Cikadu Cianjur;
 - o. Studi Pengembangan Tanaman Pisang dan Singkong Karet (*Manihot glaziovii*) di Jabar Selatan;
 - p. DBHCHT-Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di BP Mekanisasi Pertanian;
 - q. DBHCHT-Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di BPTPH (DBHCHT); dan
 - r. Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasilan Bahan Baku Industri Hasil Pertanian Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani.
2. Dalam pencapaian Indikator ke-2 yaitu Jumlah Jaringan Irigasi yang Diperbaiki, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- 1. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
 - a. Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Pertanian;
3. Dalam pencapaian Indikator ke-3 yaitu Jumlah Jumlah Luas Sawah Baru, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- 1. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
 - a. Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian;
4. Dalam pencapaian Indikator ke-4 yaitu Jumlah Petugas, Penyuluh dan Petani yang Mengikuti Pelatihan, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- 1. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
 - a. Pelatihan Pertanian di UPTD Bapeltan; dan
 - b. Pelatihan Wirausahawan Baru;
5. Dalam pencapaian Indikator ke-5 yaitu Luas Serangan OPT, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak, dan Ikan;
 - a. Pengamatan dan Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat; dan
 - b. DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Petani di Lingkungan Industri Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT).
1. Dalam pencapaian Indikator ke-6 yaitu Persentase Tingkat Kehilangan Hasil, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
 - a. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
7. Dalam pencapaian Indikator ke-7 yaitu Jumlah Kelompok/Pelaku yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
 - a. Pengembangan Teknologi, Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Dalam pencapaian Indikator ke-8 yaitu Persentase Margin Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
 - a. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Pertanian; dan
 - b. Pengembangan Teknologi, Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3.1.6.2. Kegiatan APBN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016, program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang menunjang dan mendukung terhadap capaian kinerja yang bersumber dari dana APBN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
 - b. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal; dan
 - c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
 2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;

- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; dan
 - c. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- 2. Dalam pencapaian Indikator (2) yaitu Jumlah jaringan irigasi yang diperbaiki, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.
- 3. Dalam pencapaian Indikator (3) yaitu Jumlah Luas Sawah Baru, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian.
- 4. Dalam pencapaian Indikator (4) yaitu Jumlah petugas, penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan, pelaksanaannya tidak didukung oleh anggaran yang bersumber dari dana APBN TA.2016.
- 5. Dalam pencapaian Indikator (5) yaitu Luas serangan OPT, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
 - 2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - a. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
- 6. Dalam pencapaian Indikator (6) yaitu Persentase tingkat kehilangan hasil, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
- 7. Dalam pencapaian Indikator (7) yaitu Jumlah kelompok/pelaku yang menerapkan sistem jaminan mutu, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Pengembangan Standarisasi Dan Mutu.
 - 2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - a. Fasilitas Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura.
- 8. Dalam pencapaian Indikator (8) yaitu Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Pengembangan Pemasaran Hasil Dan Investasi
 - 2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - a. Fasilitas Pemasaran Hortikultura.

3.2. Akuntabilitas Realisasi Anggaran TA.2016

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek

penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, dana APBD mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Secara keseluruhan pencapaian Realisasi Keuangan maupun fisik anggaran APBD TA.2016 sampai Bulan Desember 2016 yaitu sebesar Rp.205.136.111.584,- (95,15%) dari total anggaran sebesar Rp.215.596.701.335,- dengan pencapaian fisik sebesar 99,49%. Dengan rincian untuk Belanja Langsung, realisasi keuangan mencapai Rp.107.159.901.780,- atau (93,30%) dari jumlah anggaran sebesar Rp.114.853.147.800,- dengan pencapaian fisik sebesar 99,68%, sementara pada

kegiatan Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) realisasi keuangan mencapai Rp.97.976.209.804,- atau setara dengan (97,25%) dari jumlah anggaran sebesar Rp.100.743.553.535,- dengan pencapaian fisik sebesar 99,31%. Adapun perincian keseluruhan kegiatan dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini :

Tabel 16. Rekapitulasi Sisa Anggaran APBD TA. 2016 Per Program Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	266.000.000	213.932.000	80,43
01	<i>Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian</i>	266.000.000	213.932.000	80,43
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	4.547.667.250	3.875.519.400	85,22
02	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPTPH</i>	1.302.900.000	860.530.000	66,05
03	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSBTPH</i>	543.875.000	511.375.000	94,02
04	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Benih Padi</i>	296.950.000	287.750.000	96,90
05	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPB Palawija</i>	155.100.000	123.419.250	79,57
06	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPB Kentang</i>	120.166.250	118.116.250	98,29
07	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPB Hortikultura</i>	257.776.000	251.695.000	97,64
08	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP Mekanisasi Pertanian</i>	231.950.000	145.950.000	62,92
09	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Pertanian</i>	842.700.000	796.100.900	94,47
10	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Diperta Provinsi</i>	776.250.000	760.583.000	97,98
11	<i>Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur UPTD BPPT Cikadu CIanjur</i>	20.000.000	20.000.000	100,00
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.832.383.500	6.275.971.914	91,86
12	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTPH</i>	1.354.000.000	1.184.494.263	87,48
13	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPB Palawija</i>	299.250.000	243.493.330	81,37
14	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPB Hortikultura</i>	469.310.000	424.044.611	90,35
15	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSBTPH</i>	810.000.000	715.334.596	88,31
16	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Benih Padi</i>	451.440.000	435.921.907	96,56
17	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPB Kentang</i>	341.525.000	334.914.868	98,06
18	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BP Mekanisasi Pertanian</i>	288.180.000	252.332.505	87,56
19	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Pertanian</i>	410.400.000	400.840.597	97,67
20	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Diperta Provinsi</i>	1.710.000.000	1.613.561.219	94,36

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
21	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Pertanian Cikadu Cianjur</i>	698.278.500	671.034.018	96,10
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.770.626.150	45.480.642.320	89,58
22	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian BPB Palawija</i>	942.800.000	929.685.000	98,61
23	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di BPB Hortikultura</i>	4.895.350.000	4.703.599.898	96,08
24	<i>DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di BPB Palawija (DAK)</i>	1.325.195.000	1.279.680.750	96,57
25	<i>DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di BPB Hortikultura (DAK)</i>	1.470.000.000	1.246.895.272	84,82
26	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPTPH</i>	665.000.000	650.825.000	97,87
27	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPSBTPH</i>	597.000.000	593.894.500	99,48
28	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Balai Pengembangan Benih Padi</i>	9.949.149.000	9.100.296.000	91,47
29	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPB Kentang</i>	945.000.000	937.987.000	99,26
30	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BP Mekanisasi Pertanian</i>	5.739.200.000	4.709.946.820	82,07
31	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Pertanian</i>	1.649.100.000	1.591.222.640	96,49
32	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Diperta Provinsi</i>	1.000.000.000	982.751.000	98,28
33	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di BPSBTPH (DAK)</i>	3.604.000.000	3.405.542.000	94,49
34	<i>DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di Balai Pengembangan Benih Padi (DAK)</i>	3.765.000.000	3.453.114.000	91,72
35	<i>DAK Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Pertanian BPTPH (DAK)</i>	3.600.000.000	3.564.342.000	99,01
36	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPT Cikadu Cianjur</i>	969.000.000	952.376.100	98,28
37	<i>DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPB Kentang Pangalengan (DAK)</i>	3.719.832.150	2.024.125.000	54,41
38	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian di Balai Pelatihan Pertanian (DAK)</i>	5.935.000.000	5.354.359.340	90,22
62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.571.921.800	9.347.362.554	97,65
39	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPB Palawija</i>	810.000.000	770.441.000	95,12
40	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di BPB Hortikultura</i>	1.275.400.000	1.260.330.617	98,82
41	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPTPH</i>	1.280.000.000	1.170.763.000	91,47
42	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di BPSBTPH</i>	972.000.000	963.103.000	99,08
43	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Balai Pengembangan Benih Padi</i>	862.439.000	856.880.406	99,36
44	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di BPB Kentang</i>	1.389.110.000	1.375.368.291	99,01

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
45	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di BP Mekanisasi Pertanian</i>	297.320.000	292.220.000	98,28
46	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Pelatihan Pertanian</i>	583.207.700	582.885.700	99,94
47	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Diperta Provinsi</i>	1.324.800.000	1.310.189.294	98,90
48	<i>Pemeliharaan sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Cikadu Cianjur</i>	777.645.100	765.181.246	98,40
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	242.500.000	234.900.000	96,87
49	<i>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Diperta Provinsi</i>	142.500.000	134.900.000	94,67
50	<i>Pengelolaan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan</i>	100.000.000	100.000.000	100,00
79	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	831.250.000	632.669.688	76,11
51	<i>Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian</i>	831.250.000	632.669.688	76,11
86	Program Peningkatan Produksi Pertanian	17.292.674.100	16.729.997.423	96,75
52	<i>Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Serealia</i>	1.470.080.000	1.468.405.000	99,89
53	<i>Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul Lainnya (TKW-13)</i>	487.390.000	484.934.000	99,50
54	<i>Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat</i>	933.719.000	906.585.000	97,09
55	<i>Penyediaan Benih Bersertifikat di Jawa Barat Pada Balai Pengembangan Benih Padi</i>	985.300.000	926.142.700	94,00
56	<i>Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija</i>	562.500.000	553.560.048	98,41
57	<i>Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat</i>	895.000.000	872.354.000	97,47
58	<i>Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat</i>	2.350.935.000	2.270.985.879	96,60
59	<i>Pengembangan Agribisnis Buah-buahan</i>	587.452.000	547.900.000	93,27
60	<i>DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di Bidang Hortikultura (DBHCHT)</i>	849.810.000	812.168.215	95,57
61	<i>Pengembangan Perbenihan Kentang di BPB Kentang</i>	625.000.000	612.190.960	97,95
62	<i>Pengembangan Mekanisasi Pertanian di BP Mekanisasi Pertanian</i>	625.000.000	603.867.000	96,62
63	<i>Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan</i>	596.150.000	569.279.000	95,49
64	<i>Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di BPB Hortikultura</i>	927.980.000	918.684.900	99,00
65	<i>GCB Model Pengembangan Usahatani Hortikultura Terpadu Berbasis Konservasi di DAS Citarum (GCB)</i>	938.862.100	890.515.521	94,85
66	<i>Pengembangan Pertanian Terpadu di Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Cikadu Cianjur</i>	937.496.000	917.361.000	97,85

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
67	Studi Pengembangan Tanaman Pisang dan Singkong Karet (<i>Manihot glaziovii</i>) di Jabar Selatan	500.000.000	444.700.000	88,94
68	DBHCHT-Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di BP Mekanisasi Pertanian	1.200.000.000	1.115.470.000	92,96
69	DBHCHT-Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani di BPTPH (DBHCHT)	920.000.000	919.277.000	99,92
70	Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasilan Bahan Baku Industri Hasil Pertanian Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani	900.000.000	895.617.200	99,51
87	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	6.589.645.000	6.502.457.600	98,68
71	Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian	3.004.040.000	2.945.375.000	98,05
72	Pengawalan LOAN WISMP	185.600.000	174.072.600	93,79
73	Pelatihan Pertanian di Balai Pelatihan Pertanian	559.100.000	558.805.000	99,95
74	Pelatihan Wirausahawan Baru	2.840.905.000	2.824.205.000	99,41
88	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	16.208.480.000	16.174.862.080	99,79
76	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat	11.264.500.000	11.262.300.000	99,98
77	DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Petani di Lingkungan Industri Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	4.943.980.000	4.912.562.080	99,36
89	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	1.700.000.000	1.691.586.801	99,51
78	Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Hasil Pertanian	800.000.000	797.864.250	99,73
79	Pengembangan Teknologi, Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	900.000.000	893.722.551	99,30
TOTAL KEGIATAN		114.853.147.800	107.159.901.780	93,30
	Belanja Tidak Langsung	100.743.553.535	97.976.209.804	97,25
	<i>Belanja Pegawai</i>	100.743.553.535	97.976.209.804	97,25
JUMLAH TOTAL		215.596.701.335	205.136.111.584	95,15